



**PENGUMUMAN**  
**LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**  
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 18 Februari 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

**BIDANG** : EKSEKUTIF  
**LEMBAGA** : KEMENTERIAN KEUANGAN  
**UNIT KERJA** : DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN

**I. DATA PRIBADI**

- Nama** : MUHAMAD MUFTI ARKAN
- Jabatan** : KEPALA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN  
PROVINSI BALI
- NHK** : 120528

**II. DATA HARTA**

**A. TANAH DAN BANGUNAN** Rp. 1.285.000.000

- Tanah dan Bangunan Seluas 235 m<sup>2</sup>/70 m<sup>2</sup> di KAB / KOTA CILACAP, HASIL SENDIRI Rp. 405.000.000
- Tanah Seluas 1.000 m<sup>2</sup> di KAB / KOTA BOGOR, HASIL SENDIRI Rp. 130.000.000
- Tanah dan Bangunan Seluas 90 m<sup>2</sup>/48 m<sup>2</sup> di KAB / KOTA BOGOR, HASIL SENDIRI Rp. 750.000.000

**B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN** Rp. 193.000.000

- MOBIL, CHEVROLET SUV Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp. 141.000.000
- MOTOR, YAMAHA FAZIO Tahun 2023, HASIL SENDIRI Rp. 17.000.000
- MOTOR, HONDA ADV Tahun 2025, HASIL SENDIRI Rp. 35.000.000

**C. HARTA BERGERAK LAINNYA** Rp. 398.800.000

**D. SURAT BERHARGA** Rp. 360.229.066

**E. KAS DAN SETARA KAS** Rp. 679.320.630

**F. HARTA LAINNYA** Rp. ---

**Sub Total** Rp. 2.916.349.696

**III. HUTANG** Rp. 309.937.520



IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp.

2.606.412.176

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id). Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id), serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.